

Harmonisasi Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo

Wahidatun Nadila¹, Rosman Ilato², Ismet Sulila³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 05, 2025

Revised February 10, 2025

Accepted February 15, 2025

Available online February 20, 2025

Kata Kunci:

Harmonisasi Kebijakan, Implementasi, Penanggulangan Kemiskinan.

Keywords:

Policy Harmonization, Implementation, Poverty Reduction.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dapat terkoordinasi secara harmonis di antara organisasi perangkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi implementasi kebijakan publik, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa harmonisasi implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih baik, penguatan sumber daya, serta reformasi dalam struktur birokrasi.

ABSTRACT

This research aims to analyze the harmonization of public policy implementation in poverty alleviation in Gorontalo Regency. The main focus of this research is how planning, implementation and evaluation of policies can be coordinated harmoniously among regional organizations. Apart from that, this research also identifies factors that influence the harmonization of public policy implementation, including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with informants. The research results show that the implementation of poverty reduction policies still faces challenges in the form of weak coordination, limited resources, and inconsistencies in policy implementation. The conclusion of this research is that harmonization of public policy implementation in poverty alleviation can be improved through better communication, strengthening resources, and reform in bureaucratic structures.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gorontalo. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah disharmonisasi dalam implementasi kebijakan antara organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan ketidakefektifan program yang dijalankan. Harmonisasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Fokusnya adalah mengidentifikasi harmonisasi dalam implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari berbagai organisasi perangkat daerah, serta studi

*Corresponding author

E-mail addresses: wahidatunnadila@gmail.com

dokumentasi terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo:

1. Kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, yang menyebabkan tumpang tindih program dan ketidakefektifan dalam distribusi bantuan.
2. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur.
3. Disposisi dan komitmen pelaksana kebijakan yang beragam, sehingga mempengaruhi keberlanjutan program yang dijalankan.
4. Struktur birokrasi yang masih rigid, menyebabkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan menjadi terbatas.

Meskipun demikian, terdapat beberapa inisiatif yang mulai dilakukan untuk meningkatkan harmonisasi kebijakan, seperti penguatan komunikasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Harmonisasi kebijakan yang lebih baik dapat dicapai dengan memperbaiki mekanisme koordinasi antar instansi, memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi kebijakan secara berkala guna memastikan efektivitas implementasi.

SIMPULAN

Harmonisasi implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, ketidakharmonisan terjadi akibat komunikasi yang kurang efektif, minimnya dukungan anggaran dan SDM, serta birokrasi yang kurang adaptif. Evaluasi kebijakan menunjukkan pencapaian target belum optimal karena lemahnya monitoring dan tindak lanjut.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Koordinasi yang lemah, keterbatasan anggaran dan SDM, serta kurangnya komitmen pelaksana kebijakan menghambat efektivitas program. Selain itu, birokrasi yang kaku semakin memperburuk ketidakharmonisan dalam pelaksanaan kebijakan.

SARAN

Untuk meningkatkan harmonisasi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Koordinasi antar organisasi perangkat daerah harus diperkuat dengan sistem komunikasi yang lebih terbuka dan terintegrasi. Pengalokasian sumber daya perlu dilakukan secara strategis dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat agar kebijakan lebih inklusif.

Dalam pelaksanaan dan evaluasi, komunikasi yang efektif harus diterapkan untuk memastikan keselarasan tujuan dan mekanisme program. Optimalisasi sumber daya dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, sementara komitmen pelaksana kebijakan harus diperkuat agar implementasi berjalan sesuai rencana. Reformasi birokrasi juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih fleksibel dan adaptif. Dengan perencanaan matang, pelaksanaan sinergis, dan evaluasi berbasis data, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Jurusan Administrasi Publik, atas bimbingan dan fasilitas yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah bersedia memberikan wawasan dan pengalaman mereka terkait implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik di masa mendatang.

REFERENSI

- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar Akib Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Alaslan, A. (2021). Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar. In *CV.Pena Persada* (Vol. 53, Issue1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Alfisyahrin, D. (2021). Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan. *Jurnal Media Administrasi*, 3, 89–99. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/MAD/article/download/2720/1680>
- Alviah, N. U. R. (2020). Formulasi kebijakan kepala desa dalam pembangunan di desa beringin taluk kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi. *Administrasi Negara*, 1, 251–264.
- Bagaskara, S., Dyah Lituhayu, D., & Departemen Administrasi Publik, Ms. (2002). *Formulasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Semarang*. Oleh. 23. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Carman, M. (2023). Harmony, Disruption, and Affective Injustice: Metz and the Capacity for Harmonious Relationship. *Ethical Theory and Moral Practice*. <https://doi.org/10.1007/s10677-022-10362-0>
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484>
- Dianti, Y. (2017). model model implementasi kebijakan publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Djaenal, R., J. E. Kaawoan, & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.zzz
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 109–116.
- Edwinarta, C. D., Fauzia, M. E., & Agustine, A. D. (2022). Analisis Formulasi Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Dalam Perspektif Keimigrasian. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(1), 130–151. <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i1.6633>
- Elcaputera, A. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 121. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>
- Endah Christianingsih. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 22–41. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Fachrudin, R. (2015). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 1–12. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/112/147>